

UPAYA JEPANG UNTUK MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB MELALUI PERAN AKTIFNYA DI OECD DAN UNPKO

Jenina Ramoti Br Purba

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
jenina596@gmail.com

Nugrahaeni Nur Qolby F.U

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
nugraheninurqolbyfu@gmail.com

Stefani Triastuti

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
stefanitriastuti12@gmail.com

Zulfikar Suardi

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
zsuardi143@gmail.com

Abstrak

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membawa sejumlah perubahan dalam perpolitikan Jepang. Sejak saat itu, Jepang menerapkan politik pasifisme yang berorientasi kepada perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi Jepang dalam bantuan ekonomi semakin besar setelah menjadi bagian dari *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD). Jepang juga menunjukkan peran aktifnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keaktifan Jepang mulai terlihat pada masa Perang Teluk dengan menjadi *United Nation Peace Keeping Operation* (UNPKO). Hingga saat ini, Jepang masih menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan bantuan militer melalui UNPKO untuk menjaga perdamaian dunia. Besarnya peran Jepang dalam menjaga perdamaian dunia dan kontribusinya dalam perekonomian dunia membuatnya merasa siap untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tulisan ini menganalisa mengenai upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk mendapatkan posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui OECD dan UNPKO. Tulisan ini juga

menjelaskan bagaimana tanggapan negara-negara mengenai intensi Jepang tersebut, khususnya para negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Kata Kunci: Politik Luar Negeri Jepang, Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, OECD, UNPKO

Abstract

Japan's defeat in World War II brought several changes in Japanese politics. Since then, Japan has implemented a pacifist policy that is oriented towards peace and economic growth. Japan's contribution to economic assistance has been even greater after becoming part of the Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). Japan has also shown its active role in efforts to create world peace. Japan's activeness began to be seen during the Gulf War by becoming part of the United Nations Peacekeeping Operation (UNPKO). Until now, Japan is still one of the countries that actively sends military assistance through UNPKO to maintain world peace. The magnitude of Japan's role in maintaining world peace and its contribution to the world economy has made it feel ready to become a permanent member of the UN Security Council. This paper analyzes the efforts made by Japan to obtain a position as a permanent member of the UN Security Council through the OECD and UNPKO, and the responses of countries regarding Japan's intentions. This paper also explains the response of countries regarding Japan's intentions, especially the permanent member countries of the UN Security Council.

Keywords: Japanese Foreign Politics, Permanent Members of the UN Security Council, OECD, UNPKO

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1956, Jepang telah menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tumbuh menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Perjalanan panjang Jepang untuk mencapai hal tersebut tak lepas dari sejarahnya pada zaman Restorasi Meiji sebagai awal mula era industrialisasi, terlebih ketika berakhirnya Perang Dunia II, perekonomian Jepang berhasil bertumbuh sangat drastis dalam waktu yang singkat.

Kekalahan Jepang di Perang Dunia II membawa sejumlah perubahan dalam perpolitikan Jepang dikarenakan *occupation regime* yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuat Jepang merasakan praktik "politik karaoke". Jepang bahkan menonaktifkan militernya dan menggantungkan keamanan wilayahnya kepada Amerika Serikat. Sejak

saat itu, Jepang hanya berfokus kepada pengembangan ekonominya melalui sejumlah kebijakan, antara lain adalah *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Official Development Assistance* (ODA) yang saling mendukung satu sama lain. Kontribusi Jepang dalam bantuan ekonomi semakin besar setelah menjadi bagian dari *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD).

Selain itu, meletusnya Perang Korea yang menyebabkan Perdana Menteri Yoshida membentuk pasukan pengaman yang kelak menjadi cikal bakal dari pasukan *Japan Self Defense Force*. Akibatnya, terjadi amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang yang awalnya mengatakan untuk menonaktifkan militer, mengalami penafsiran baru bahwa militer diperbolehkan sebatas sebagai tindakan defensif dari serangan luar. Sejak saat itu, Jepang mulai membangun kembali militernya dengan tujuan defensif. Puncaknya berada pada tahun 1976 ketika Perdana Menteri Takeo Miki menetapkan batas anggaran pertahanan Jepang sebesar maksimal 1% dari GNP.

Kemudian, Pasal 9 kembali mengalami penafsiran di tahun 1980-an akibat desakan dari Amerika Serikat agar Jepang lebih terlibat dalam kegiatan pertahanan di dunia Internasional. Keaktifan Jepang mulai terlihat pada masa Perang Teluk dengan menjadi *United Nation Peace Keeping Operation* (UNPKO). Hingga saat ini, Jepang masih menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan bantuan militer melalui UNPKO untuk menjaga perdamaian dunia.

Besarnya peran Jepang dalam menjaga perdamaian dunia dan kontribusinya dalam perekonomian dunia membuatnya merasa siap untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Klaim tersebut dibuktikan dengan tindakan Jepang yang selalu mengusulkan reformasi untuk DK PBB dikarenakan komposisi saat ini tidaklah mencerminkan perubahan politik dan ekonomi pada masyarakat internasional dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Jepang juga aktif menyuarakan transparansi dan penggunaan hak veto DK PBB yang mementingkan kepentingan sendiri.

KERANGKA BERPIKIR

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan analisis yang berdasarkan kepada konsep rezim internasional dengan pendekatan neo-liberalisme untuk mengembangkan dan menguatkan dasar dari pembahasan dalam tulisan ini. Rezim internasional dapat diartikan sebagai prinsip, aturan, norma ataupun prosedur *decision-making* yang mempertemukan ekspektasi para aktor melalui perjanjian serta kerjasama antar negara yang harus dipatuhi dalam interaksi internasional. Di dalam rezim internasional, termuat peraturan dan norma yang disepakati bersama atau yang disebut sebagai *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang berlaku dan harus dipatuhi. Negara-negara anggota tidak diperbolehkan untuk melanggar peraturan dan norma tersebut sehingga rezim internasional mampu mengontrol serta membentuk perilaku negara anggotanya. Rezim internasional juga memperhatikan kepentingan dari masing-masing negara. Oleh karena itu, rezim internasional menjadi wadah yang paling efektif untuk melakukan hubungan kerja sama.

Krashner (1982) menjabarkan secara detail bahwa prinsip dari rezim internasional adalah keyakinan akan fakta, faktor penyebab serta prosedur yang harus dilakukan. Kemudian norma dari rezim internasional dituangkan ke dalam bentuk hak dan kewajiban. Aturan yang dimaksud dalam rezim internasional berbentuk ketentuan serta larangan yang bersangkutan dengan norma. Dan prosedur *decision making* berdasarkan keputusan dan kepentingan bersama. Krashner juga menyebutkan bahwa rezim internasional memiliki variabel bebas seperti *power* dan variabel terikat seperti *interest*. Keberadaan rezim internasional menjadi sebuah payung yang menaungi negara-negara dalam melewati konstelasi politik internasional yang tidak menentu dan menuntun negara-negara tersebut ke tujuan bersama yaitu pemecahan dari masalah bersama yang dihadapi oleh negara anggota.

Rezim internasional sendiri, menurut Hannida (2015) dapat dianalisis melalui tiga pendekatan yaitu realis, neo-liberalisme dan konstruktivis. Pendekatan realis melihat rezim internasional sebagai *zero sum game* dimana negara berusaha mendominasi negara lain menggunakan *power* untuk mencapai kepentingan pribadi. Kemudian pendekatan neo-liberalisme sendiri memusatkan perhatiannya kepada keuntungan

bersama. Walaupun negara selalu fokus dengan kepentingan nasionalnya, namun negara harus melakukan kerjasama internasional untuk mencapai keuntungan absolut untuk setiap negara anggota. Sementara pendekatan konstruktivis menganggap bahwa rezim internasional merupakan konstruksi sosial yang dihasilkan oleh negara-negara berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta ideologi.

Alasan kuat penulis mengangkat konsep rezim internasional dengan pendekatan konstruktivis adalah dikarenakan dunia saat ini memiliki rezim yang sangat kuat yaitu PBB dimana 193 negara menjadi anggotanya. Negara-negara tersebut memiliki satu tujuan bersama yaitu menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Kemudian, PBB memiliki sejumlah aturan, prinsip dan norma yang didasarkan atas persetujuan bersama. Adapun pendekatan neo-liberalisme mengacu kepada perilaku Jepang yang ingin mereformasi PBB dikarenakan tindakan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB hanya berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Sejalan dengan pendekatan neo-liberalisme, Jepang menginginkan kerjasama untuk memenuhi kepentingan bersama. Jepang juga lebih berfokus kepada perdamaian dan perkembangan ekonomi dilihat dari aktivitasnya di OECD dan UNPKO.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis topik penelitian yang diangkat, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *literature review*. Pendekatan kualitatif menggunakan metode riset yang bersumber kepada data-data yang bersifat tulisan, lisan, pengamatan ataupun observasi yang sejalan dengan topik yang diangkat. Pendekatan ini bermaksud untuk mempelajari serta memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, minat, motivasi, persepsi, ataupun tindakan. Teknik pengumpulan data melalui *literature review* merupakan teknik pengumpulan data yang mencari informasi melalui buku, jurnal, majalah, dokumen resmi, berita ataupun sumber lain dari internet yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana data primer berasal dari sumber langsung seperti narasumber pertama ataupun laporan langsung dari *web sites* lembaga terkait. Data sekunder didapatkan melalui

informasi yang tercantum di dalam penelitian, jurnal atau artikel yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang sejenis atau berkaitan. Dengan metode tersebut, penulis berusaha untuk mencari informasi mengenai tujuan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan upayanya dalam mewujudkan niat tersebut melalui peran aktifnya di OECD dan UNPKO serta tanggapan negara-negara lain terutama negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB saat ini.

PEMBAHASAN

Jepang telah bergabung menjadi anggota PBB sejak tahun 1956 dan menjadikan PBB sebagai pijakan untuk politik luar negerinya. Selama keanggotaannya di PBB, Jepang terlibat aktif dalam upaya untuk mencapai kemakmuran, perdamaian dan stabilitas dunia. Kontribusi Jepang terlihat dari bantuannya dalam penyelesaian isu-isu global, mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara yang paling banyak memberikan bantuan dana kepada PBB untuk upaya perlindungan keamanan internasional.

Peran aktif Jepang dalam hal pembangunan ekonomi dan perdamaian terlihat jelas dalam keaktifannya di OECD dan UNPKO. OECD sendiri merupakan organisasi internasional yang berfokus kepada upaya pembentukan kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesejahteraan, dan kesempatan bagi semua pihak untuk saling bekerja sama dalam menemukan solusi terhadap tantangan bersama di bidang ekonomi. Sementara untuk UNPKO, merupakan program yang dinaungi oleh PBB dengan fokus untuk menjaga dan melindungi perdamaian serta keamanan internasional. Berdasarkan piagam PBB, UNPKO bertujuan untuk mencegah agar sebuah konflik yang terjadi tidak menyebar luas ke negara lain, menstabilkan situasi konflik pasca gencatan senjata, membantu dan mengimplementasikan perjanjian perdamaian yang komprehensif serta membimbing negara-negara menuju pemerintahan yang stabil didasarkan pada prinsip demokrasi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta implementasi dari *good governance*.

Peran-peran aktif tersebut berhasil membuat Jepang dipercaya oleh dunia internasional untuk menduduki kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jepang sendiri

tercatat telah menduduki kursi tersebut sebanyak 12 kali dan semakin memperkuat pengaruh Jepang dalam upaya perwujudan perdamaian. Merasa bahwa dunia internasional menaruh harapan besar terhadap Jepang dan melihat situasi internal Dewan Keamanan PBB, maka Jepang memiliki niat untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kesanggupan Jepang dalam menempati posisi tersebut, Jepang meningkatkan keaktifannya di OECD dan UNPKO.

Alasan Jepang Menginginkan Kursi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Jepang pertama kali mengungkapkan niatnya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB oleh Perdana Menteri Miyazawa Kiichi pada tahun 1992 setelah Undang-Undang *Peace Keeping Operation* (PKO). Jepang menganggap dirinya pantas untuk menduduki kursi tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu kontribusi Jepang dalam upaya pemeliharaan perdamaian dengan mengirim *Japan Self Defence Force* (SDF), kerjasama keuangan Jepang dengan PBB yang menyumbang 20,6% untuk pendanaan PBB yang merupakan donatur terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Selanjutnya, Jepang juga berkomitmen untuk membantu PBB dalam melakukan pelucutan senjata dan non-proliferasi internasional dengan mempertahankan prinsip non-nuklir Jepang. Jepang juga telah berulang kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Tindakan Jepang tersebut tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi kepentingan dari Jepang sendiri. Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuat Jepang bisa lebih aktif lagi dalam upaya memelihara keamanan dan perdamaian nasional sehingga dapat meningkatkan kontribusi Jepang terhadap politik internasional, dalam artian Jepang juga ingin membangun power tidak hanya dalam kekuatan ekonomi saja. Selain itu, saat ini, hanya Tiongkok yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dari perwakilan Asia. Dengan mendapatkan kursi anggota tetap Dewan Keamanan, Jepang bisa menjadi cahaya baru Asia yang akan mewakilkan suara negara-negara Asia di forum PBB. Hal ini bisa menyokong ambisi Jepang untuk mewujudkan tujuan politik luar negerinya untuk memperkuat Jepang melalui pilar

perdamaian. Jepang juga ingin mengakhiri bentuk PBB yang masih berdasarkan atmosfer masa Perang Dunia II. Jepang ingin menyesuaikan PBB dengan masa saat ini.

Secara garis besar, alasan Jepang menginginkan kursi anggota tetap Dewan Keamanan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan sisi politik dan sisi kebudayaan. Berdasarkan sisi politik, Jepang menganggap bahwa dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat melegitimasi identitasnya dalam pergaulan internasional. Mengingat Jepang saat ini memiliki status sebagai salah satu negara yang memiliki nilai perekonomian terbesar di dunia, maka melalui hal ini Jepang mendapatkan batu loncatan untuk meningkatkan kontribusinya secara langsung kepada dunia internasional. Kekuatan ekonomi Jepang secara tidak langsung turut mempermudah Jepang dalam memperkuat kemampuan militer dan perpolitikannya dalam permainan catur politik internasional. Khususnya pasca Perang Dunia II, semenjak Jepang menerapkan militer proaktif pasifisme, Jepang sangat ingin menunjukkan dan meyakinkan dunia bahwa saat ini negaranya telah berpindah haluan menjadi negara yang cinta damai. Oleh karena itu, dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB Jepang beranggapan dapat terlibat secara langsung dalam jangka waktu yang sangat panjang dalam menciptakan keamanan dan perdamaian internasional. Upaya ini sudah dilakukan oleh Jepang, terbukti dengan kebijakannya yang mendukung anti senjata nuklir.

Meski Jepang merupakan negara yang memiliki sistem militer pasifisme, hal tersebut tidak menghalangi Jepang untuk bercita-cita menjadi kekuatan yang lebih penting di kawasan Asia ada khususnya dan dunia pada umumnya. Maka dari itu, dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jepang seperti memegang kunci kekuatannya sehingga dapat mengimplikasikan arah diplomasinya yang lebih nyata melalui diplomasi multilateral. Disadari untuk meraih posisi yang lebih kuat di dalam kancah internasional, Jepang perlu memperkuat kontribusinya di bawah kepentingan dan payung PBB. Guna memperkuat kontribusi tersebut, Jepang memerlukan informasi lebih mengenai berbagai isu yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB dan hak veto agar suaranya lebih berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Halangannya, saat ini perwakilan Asia di dalam Dewan Keamanan

PBB yang memiliki hak veto hanyalah China saja. Jepang merasa bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya, maka ia juga pantas menjadi perwakilan Asia di Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Berdasarkan kemampuannya, Jepang beranggapan bahwa seharusnya dirinya menjadi bagian dari kekuatan politik dunia yang sejajar dengan kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Intensi dan ambisi menjadi Dewan Keamanan PBB ini tidak lepas dari nilai budaya Jepang yaitu *survive* dan *gimu*. Budaya *survive* mengajarkan Jepang untuk terus berusaha dalam mencapai keinginannya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan melalui adaptasi terhadap perubahan dalam menciptakan dan merancang politik luar negeri untuk digunakan dalam berhubungan dengan negara lain. Berawal dari letak geografisnya yang terpencil dan kerap mengalami bencana alam serta hasil bumi yang terbatas menjadikan masyarakat Jepang memiliki "*sense of survival*" yang lebih dibandingkan dengan negara lain. Maka dari itu, bukanlah hal yang mengejutkan ketika Jepang memiliki kemampuan meminimalisir resiko dengan baik. Perilaku hati-hati dalam berpolitik yang dimiliki Jepang menjadi dasar pertahanan yang menguntungkan. Ditambah lagi pemerintahnya berhasil menanamkan karakteristik masyarakatnya menjadi jiwa pekerja keras yang mau bersatu memperjuangkan kepentingan negaranya di atas segala-galanya.

Selain budaya *survive*, Jepang juga terkenal dengan budaya *gimu*. Kebudayaan ini berasal dari *history* kelam yang pernah dilakukan oleh Jepang ketika Perang Dunia II. Saat ini, Jepang bersikeras menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengupayakan penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia melalui berbagai keunggulan yang dimilikinya. Contoh nyata tindakan tanggung jawab Jepang kepada dunia atas *history* kelamnya, Jepang memberikan kontribusi ekonomi kepada negara-negara berkembang melalui *Official Development Agency* (ODA). Atas kemajuan yang dimilikinya, Jepang merasa kapabel untuk turut serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu-isu internasional. Maka dari itu, semakin kuat keinginan Jepang untuk bergabung menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan penjabaran di atas, melihat bagaimana Jepang menyatakan alasannya dan melakukan berbagai upaya untuk membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB maka, penulis menganggap bahwa Jepang memiliki alasan yang kuat dan dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Jepang juga menggunakan alasan yang benar-benar sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian dunia. Dilain sisi, alasan-alasan tersebut pada dasarnya juga dipengaruhi oleh kepentingan nasional Jepang sendiri. Namun, terlepas dari alasan dibalik niat Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jepang telah menunjukkan kecakapannya dan membuat banyak negara memercayakan posisi tersebut terhadap Jepang.

Kontribusi Jepang Melalui OECD

OECD merupakan sebuah wadah/organisasi dengan tujuan mempromosikan kebijakan yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat seluruh dunia. Melalui organisasi ini mendorong Jepang untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang, untuk mendorong liberalisasi perdagangan. Bentuknya berupa dana dan bimbingan pelatihan, seperti teknik yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial ekonomi. Selain itu, Jepang juga aktif memberikan bantuan kepada para korban bencana. Bantuan tersebut disalurkan oleh pemerintah Jepang sebagai pelaku utama dengan sebutan *Official Development Assistance (ODA)*.

Untuk kawasan Asia terutama ke Indonesia, Jepang aktif memberikan dana bantuan ODA terutama dengan latar belakang sejarah di mana Indonesia merupakan negara bekas jajahan Jepang, dan Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam mineral dibanding negara Asia lain. Jepang melakukan ini untuk memperkuat *bargaining position* sebagai negara pendonor dana terbesar dan dengan begitu Jepang dapat menggunakan strategi ini untuk kebutuhan ekspor negaranya. Di tahun 1960 Jepang memberikan bantuan dana hibah senilai 14,28 juta US\$ kepada Indonesia. Pemberian dana tersebut digunakan untuk membantu pembangunan negara dan menjadi pintu masuk bagi kerja sama Jepang dengan Negara Indonesia dalam perekonomian berupa promosi ekspor

produk-produk Jepang dan impor bahan-bahan mentah yang digunakan oleh Jepang untuk meningkatkan produksi industrinya.

Jepang memberikan sistem bantuan dana hibah yang disebut dengan bantuan pinjaman Yen. Dengan pinjaman Yen tersebut negara dapat meminjam dana dengan persyaratan yang ringan, berjangka panjang dan berbunga rendah. Hal ini diperlukan oleh negara berkembang untuk menata fondasi sosial ekonominya yang nantinya akan menjadi dasar dari pembangunan negara tersebut. Pinjaman Yen ini dilakukan melalui *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*.

Berikutnya, ada bantuan yang disebut dengan bantuan teknik, melalui bantuan teknik ini Jepang akan mengadakan *trainee* atau pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di negara-negara berkembang. Karena Jepang percaya dengan memiliki sumber daya manusia yang baik maka perkembangan sosial ekonomi dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik. Cara yang dilakukan Jepang adalah dengan mengundang tenaga magang, relawan, mengirim tenaga ahli, mengirim bantuan mesin dan teknologi, melakukan *survey* dan penelitian melalui badan pemerintahan independen *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.

Jepang banyak memberikan bantuan kepada negara di Asia tetapi secara keseluruhan Asia Tenggara merupakan penerima yang paling banyak menerima ODA Jepang, terkhususnya ODA Jepang yang bersifat bilateral. Seperti yang kita ketahui bahwa Asia Tenggara memiliki banyak potensi di dalam sumber daya alamnya yang sangat mempengaruhi perindustrian di Jepang contohnya seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara, terutama semenjak krisis minyak maka Jepang perlu berinovasi dan beralih dari ketergantungan penggunaan minyak bumi. Serta letak negara-negara yang ada di Asia Tenggara secara geografis memiliki potensi pasar yang besar bagi Jepang.

Selain itu Jepang melihat bahwa rata-rata negara di Asia Tenggara ekonominya masih belum maju, melalui hal ini Jepang melakukan sistem *bargaining* yang dianggap lebih efisien selain itu di satu sisi menguntungkan untuk Jepang karena secara tidak langsung negara tersebut akan merasa ketergantungan dengan ekonomi Jepang. Terutama pada saat krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1999 yang menyebabkan

hancurnya perekonomian di Asia Tenggara, Jepang tidak mengalami imbasnya secara langsung tetapi tetap saja akan mempengaruhi perekonomian Jepang karena banyak investasi yang ditanamkan Jepang di negara Asia Tenggara yang mengakibatkan banyak terjadi kebangkrutan. Pada tahun 1990 ODA sendiri sudah mulai mengalami penurunan akibat pecahnya gelembung ekonomi, tetapi krisis yang terjadi di Asia ini semakin mempercepat laju penurunan. Setelah kejadian tersebut banyak negara-negara OECD untuk memperbaiki sistem kebijakan ODA yang awalnya berat pada kuantitas sekarang lebih fokus kepada kualitas, contoh tuntutan yang diberikan Jepang diharapkan dapat memberikan bantuan sebagai hibah daripada sebagai pinjaman, dan diberikan kepada sektor tertentu seperti permasalahan kemiskinan, lingkungan, dan HAM.

Setelah semua tuntutan tersebut bukan berarti ODA Jepang tidak memiliki pengaruh lagi, apalagi setelah kemunculan China sebagai aktor baru dalam perekonomian regional, yang posisinya dapat menyaingi Jepang, maka dari itu pemerintah Jepang tidak tinggal diam mereka langsung melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan ODA yang mereka miliki. Dan dari sini Jepang juga mulai memperkuat kembali hubungan ekonominya dengan negara-negara di Asia Tenggara terkhususnya di Indonesia pasca krisis Asia dengan instrumen ODA dengan melalui cara yang sudah dijelaskan di atas atau paragraf sebelumnya.

Selain kepada negara-negara di Asia Tenggara Jepang sendiri dengan organisasi OECDnya juga memberikan bantuan kepada negara di Afrika salah satunya adalah Kenya melalui program yang bernama *Tokyo International Conference on Africa Development* (TICAD). Kerjasama ini bermula di tahun 2003 dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan, perdamaian, keamanan Afrika melalui penguatan hubungan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan multilateral. Setelah berakhirnya perang dingin, negara Afrika terkena dampak nyata dimana negara-negara lain tidak begitu memandang Afrika sebagai negara yang bermakna bagi geopolitik dunia. Karena hal ini Jepang pun ingin membantu memfokuskan kembali perhatian International kepada Afrika melalui TICAD. Hasil dari forum-forum yang dilaksanakan sebelumnya adalah TICAD berhasil menghasilkan beberapa perjanjian bisnis dan *blue print* pembangunan Afrika di masa mendatang. Dan pembahasannya pun semakin melebar mencakup bidang politik,

ekonomi, hingga meluas ke pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan inovasi teknologi.

TICAD VI dilaksanakan pada tanggal 27-28 Agustus tahun 2016 di Kenya, Africa dibawah pemerintahan Shinzo Abe dengan tema "*Advancing Africa's Sustainable Development Agenda: TICAD Partnership for Shared Prosperity*". Fokus utama dalam pertemuan ini adalah memfokuskan pada transformasi ekonomi, sistem kesehatan dan kestabilan sosial. Selain menjadi tempat pelaksanaan TICAD Kenya menjadi penerima ODA terbesar di Afrika dan merupakan tuan rumah bagi beberapa proyek bantuan regional. Selanjutnya Jepang juga fokus terhadap isu *Human Security* di Kenya meliputi kasus kerawanan ekonomi, kerawanan pangan, kerawanan lingkungan, kerawanan kesehatan, juga kerawanan politik. Kerawanan ekonomi yang dialami Kenya secara garis besar disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Kenya yang pada akhirnya mempengaruhi segala aspek kehidupan lainnya contoh lainnya kerawanan pangan terjadi karena panen yang buruk dan kurangnya pendapatan karena tingkat pengangguran yang tinggi.

Adapun bentuk ODA Jepang ke Kenya terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu bantuan hibah, bantuan pinjaman, dan kerja sama teknis. Dari tahun 1993 hingga 1995, Jepang merupakan pendonor terbesar di Kenya. Bantuan hibah di Kenya meningkat dari US\$ 57 juta di tahun 1993 menjadi US\$ 93 juta di tahun 1995. Bantuan pinjaman yang diberikan Jepang didistribusikan ke beberapa aktor penggerak ekonomi Kenya yaitu pemerintah dan badan usaha milik negara. Total pinjaman yang diberikan Jepang mencapai 1.451,2 US Dollar. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan contohnya seperti project perluasan area irigasi pertanian sehingga produktivitas hasil pertanian pun meningkat. Area irigasi ini awalnya hanya 65 acre namun saat ini dapat berkembang hingga 30.050 acre, dengan 22.000 acre diantaranya digunakan untuk produksi padi, sementara sisanya digunakan untuk budidaya tanaman subsistem. Bentuk dukungan Jepang terhadap ketahanan pangan Kenya pun terlihat dari pinjaman yang disalurkan untuk pembelian beras saat Kenya mengalami krisis pangan, juga pembangunan gudang gandum. dapat disimpulkan bahwa kebijakan Jepang untuk memberikan pinjaman ke Kenya telah memenuhi salah satu aspek *human security* yaitu *food security*.

Dalam bidang kesehatan Jepang menyediakan fasilitas kesehatan dan air minum bersih yang aman dikonsumsi seperti pasokan air di Nukuru dan pasokan air Nairobi. Melalui hal ini Jepang berhasil mengimplementasikan aspek *health security*. Kemudian dalam bidang ekonomi Jepang membantu mendukung perekonomian Kenya melalui pembangunan Bandar udara dengan membangun proyek pembangkit listrik dan mendukung pembangunan jalur transmisi listrik yang meningkatkan distribusi listrik di Kenya yang secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi Kenya. Selanjutnya ada juga Mombasa Airport Project di tahun 1990 dan tahun 2017. Dengan tujuan melalui pembangunan bandara ini dapat menjadi penghubung negara Afrika dengan negara-negara lainnya serta dapat membantu memajukan sektor pariwisata yang ada disana.

Untuk bidang *environmental security*, Jepang membantu pembangunan dan perlindungan desa-desa yang ada di Kenya. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman yang digunakan untuk mendukung energi terbarukan yang disalurkan pada *Kenya Electricity Generation Company* (KEN GEN) untuk pembangunan jalur transmisi Olkaria-Lessos-Kisumu. Upaya mempromosikan pengembangan panas bumi sebagai sumber energi bersih dan terjangkau dan menstabilkan pasokan energi di Kenya.

Penulis berpendapat bahwa kontribusi Jepang melalui OECD ini sangatlah banyak dan membuktikan bahwa Jepang memiliki kekuatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara-negara di dunia. Jepang menjadi salah satu negara yang fokus untuk membantu perkembangan negara-negara Afrika yang dimana negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak terlalu memberikan banyak kontribusi. Tidak sedikit negara-negara Afrika yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui OECD. Dengan begitu, negara-negara tersebut tentunya mendukung Jepang untuk menduduki kursi tetap Dewan Keamanan PBB.

Kontribusi Jepang Melalui UNPKO

Jepang mengesahkan Undang-Undang Kerjasama dengan *United Nations Peacekeeping Operations* (UNPKO) atau Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dan Operasi Lainnya (Undang-Undang Kerjasama Perdamaian Internasional) pada bulan Juni 1992 untuk mengambil bagian yang lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian

dunia. Sejak saat itu, Jepang telah memberikan kontribusi yang signifikan secara finansial dan barang kepada upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia. Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Operasi Bantuan Kemanusiaan Internasional, dan Operasi Pemantauan Pemilihan Internasional adalah tiga landasan kerja sama internasional Jepang untuk perdamaian yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Pada masa sekarang ini, dengan berbagai pertimbangan, Jepang akhirnya memiliki pasukan militer dengan kemampuan defensif-aktif yang di mana dapat melakukan serangan balik terhadap musuh yang melakukan ancaman langsung ke dalam teritorialnya. Pasukan ini dikenal dengan nama *Self Defense Forces* (SDF) atau *Jietai* atau Pasukan Bela Diri. *Jietai* merupakan angkatan bersenjata bagi Jepang karena berasal dari pasukan paramiliter, menempatkan Perdana Menteri sebagai komandan tertinggi, dan terdiri atas *Japan Ground Self-Defense Force (Rikujō Jieitai)*, *Japan Maritime Self-Defense Force (Kaijō Jieitai)*, dan *Japan Air Self-Defense Force (Koku Jieitai)*.

Dalam kontribusi Jepang melalui UNPKO, terdapat tugas-tugas berikut yang dilaksanakan untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, tugas-tugas yang diberikan di bawah ini dalam (10) sampai (17) untuk operasi bantuan kemanusiaan internasional, dan dalam (7) dan (17) untuk operasi pengamatan pemilihan internasional semuanya dianggap sebagai bagian dari "Jepang" penugasan kerja sama perdamaian internasional" (Pasal 3, butir 3).

1. Memantau ketaatan penghentian konflik bersenjata atau pelaksanaan relokasi, penarikan atau demobilisasi angkatan bersenjata yang disepakati di antara Para Pihak dalam konflik bersenjata;
2. Penempatan dan patroli zona penyangga dan daerah lain yang dibatasi untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata;
3. Pemeriksaan atau identifikasi senjata dan bagian-bagiannya yang dibawa masuk atau keluar dengan kendaraan atau alat transportasi lain atau berjalan kaki;
4. Pengumpulan, penyimpanan, atau pembuangan senjata yang ditinggalkan dan bagian-bagiannya;

5. Bantuan penunjukan garis gencatan senjata atau batas-batas serupa lainnya oleh Para Pihak dalam konflik bersenjata;
6. Bantuan pertukaran tawanan perang di antara Para Pihak dalam konflik bersenjata;
7. Pengamatan atau pengelolaan pelaksanaan pemilihan yang adil untuk majelis perwakilan, referendum atau pemilihan atau pemungutan suara serupa lainnya;
8. Pemberian saran atau bimbingan dan pengawasan terkait masalah administrasi kepolisian;
9. Pemberian saran atau bimbingan terkait hal-hal administratif selain (8) di atas;
10. Perawatan medis termasuk tindakan sanitasi;
11. Pencarian atau penyelamatan orang-orang yang menderita atau bantuan dalam pemulangan mereka;
12. Pendistribusian makanan, pakaian, perbekalan medis dan kebutuhan sehari-hari lainnya kepada orang yang menderita;
13. Pemasangan fasilitas atau peralatan untuk menampung orang yang menderita;
14. Tindakan untuk perbaikan atau pemeliharaan fasilitas atau peralatan yang rusak karena konflik, yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari orang yang menderita;
15. Langkah-langkah pemulihan lingkungan alam yang mengalami pencemaran dan kerusakan lainnya akibat konflik;
16. Transportasi, penyimpanan atau reservasi, komunikasi, konstruksi, pemasangan, inspeksi atau perbaikan mesin dan peralatan lainnya selain apa yang tercantum dalam (1) hingga (15) di atas.
17. Tugas-tugas lain yang serupa dengan yang tercantum dalam (1) hingga (16) di atas sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Kabinet.

Kebijakan dalam negara Jepang tidak terlepas dari berbagai isu keamanan yang berkembang terutama terorisme. Setelah kejadian penyerangan gedung *World Trade*

Center (WTC) dan Pentagon pada 9 September 2001, Jepang melegalkan undang-undang baru seperti *Law on Anti-Terrorism Special Measure (2001)*, *Law on Armed Contingency in Japan (2003)*, dan *Law on Concerning the Special Measure on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq (2003)*, yang memiliki pengaruh besar terhadap dimobilisasikannya pasukan SDF ke luar wilayah teritorial Jepang. Serta karena meningkatnya instabilitas di negara Asia Timur.

Karena banyaknya isu keamanan yang tidak dapat dikesampingkan, Jepang membuat banyak kebijakan baru perubahan status *Japan Defense Agency (JDA)* menjadi *Ministry of Defense of Japan (MOD)* tahun 2007, pembentukan *National Security Council (NSC)* tahun 2013, serta penyusunan *National Security Strategy (NSS)*, *National Defense Program Guideline (NDPG)* dan *Medium Term Defense Program (MTDP)* yang baru. Hal ini sangat berpengaruh dalam perluasan tanggung jawab Jepang untuk lebih proaktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional. Dengan kebijakan yang dibuat Jepang sangat berpengaruh dalam keterlibatan SDF di dalam *United Nations Peacekeeping Operation (UN-PKO)* di Sudan Selatan tahun 2011-2017.

Pada konflik-konflik yang terjadi di negara tersebut, Jepang hadir terlibat untuk menciptakan perdamaian, khususnya Tokyo yang berperan cukup besar. Melalui keterlibatan militer (tradisional), Jepang juga hadir dengan cara-cara multidimensional atau kontemporer, seperti kerangka kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, diplomasi, dan berbagai bantuan lainnya. Perkembangan kebijakan Pertahanan Jepang berperan penting dalam keterlibatan aktif SDF dalam UNPKO terutama di Sudan Selatan. Keterlibatan Jepang dalam mengatasi konflik Sudan Selatan merupakan sebuah misi penjaga perdamaian terlama yang dilakukan oleh Jepang, di mana pendekatan keamanan manusia berorientasi pada pembangunan non-militer yang terbukti berguna dalam membantu Jepang memenuhi kewajiban internasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Jepang.

Keterlibatan Jepang dapat dilihat tidak hanya melalui pengiriman pasukan militer, tetapi dalam sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur: rumah sakit, sekolah, jalan, dll. Jepang juga berkolaborasi dengan *Japan Cooperation International Agency (JICA)* untuk bekerja sama dengan perusahaan konstruksi lokal dan lembaga terkait yang ada

di Sudan Selatan. Keberhasilan ini dapat dilihat dengan dibangunnya Freedom Bridge untuk mengurangi ketergantungan negara dan masyarakat terhadap produksi minyak. Selanjutnya, Bantuan Kemanusiaan (*Humanitarian Assistance*) memberikan dukungan dana terhadap *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *World Health Organization* (WHO), *UN World Food Programme* (UNWFP) sebesar 11,8 juta USD. Jepang juga bergabung dengan UNMISS dengan mengirimkan pasukan militernya yang diketuai Lt. Col. Norihisa Urakami untuk memberikan pelatihan kepada seribu seratus lebih petugas keamanan Sudan Selatan dalam hal manajemen trauma, respon darurat, manajemen bencana, dan lainnya.

Penulis memandang kontribusi dan keterlibatan Jepang yang sangat signifikan melalui UNPKO menjadi bukti nyata komitmen Jepang atas upayanya dalam mendorong dan menciptakan perdamaian dunia. Dapat dilihat bahwa pencapaian Jepang dalam berkontribusi pada UNPKO dinilai cukup berhasil dan mendapatkan banyak dukungan dari publik. Keseriusan Jepang ditunjukkan dengan kontinuitas keterlibatan pemerintah Jepang dalam upaya publisitas tentang Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dan partisipasi Jepang dalam operasi ini demi memperdalam pemahaman serta dukungan dari masyarakat terhadap kontribusi ini.

Tanggapan Dunia Internasional Terhadap Intensi Jepang Untuk Menjadi Dewan Keamanan PBB

Usulan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB mendapat pro dan kontra di dalam panggung politik Internasional. Beberapa negara mendukung Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan beberapa lagi menolaknya. Negara-negara yang mendukung Jepang tentunya beranggapan bahwa misi yang dibawa oleh Jepang sangat relevan dengan kondisi politik saat ini. Mereka juga sependapat bahwa penggunaan hak veto sangatlah tidak demokratis, sementara Jepang ingin mereformasi hal tersebut.

Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mendukung Jepang adalah Amerika Serikat, walaupun dukungan tersebut juga tak lepas dari kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri. Terdapat juga negara-negara yang memiliki visi yang sama

dengan Jepang untuk merebut kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Jerman, India, dan Brazil atau dikenal sebagai negara *Group of Four (G4)*. Negara-negara G4 tentunya saling mendukung intensi satu sama lain. Selain itu, dukungan negara-negara lain yang menginginkan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB tercermin dari kepercayaan mereka untuk memilih Jepang sehingga Jepang bisa berulang kali menjabat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta dari negara-negara yang mendapatkan bantuan dari Jepang.

Adapun negara-negara yang menolak adalah negara-negara yang masih memiliki rasa takut terhadap aktivitas Jepang selama Perang Dunia II. Adapula Tiongkok yang paling aktif menolak Jepang untuk bergabung menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena bisa mengancam dominasi Tiongkok di Asia. Korea Utara juga menyuarakan ketidaksetujuannya apabila Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Korea Utara yang notabene musuh Amerika Serikat berpendapat bahwa apabila Jepang menjadi anggota tetap, itu sama halnya dengan menambah suara dalam vote untuk mengacaukan keamanan. Selain itu, terdapat beberapa usulan untuk menambah anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi enam bahkan delapan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, namun sampai saat ini belum memiliki kejelasan dikarenakan selalu mendapat penolakan melalui penggunaan hak veto dan penolakan dari negara-negara *Uniting for Consensus* yang terdiri dari Italia, Pakistan, Argentina, Meksiko, Kanada, Korea Selatan, Turki, dan Malta

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Jepang berupaya menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB dengan menunjukkan peran aktifnya di dunia internasional melalui OECD dan UNPKO. Kontribusi Jepang melalui OECD yaitu berupa pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan dana dan bantuan teknis ke beberapa negara termasuk Indonesia. Bantuan yang diberikan Jepang ini merupakan salah satu strategi untuk memperluas pengaruhnya sebagai negara pendonor dana terbesar dan untuk kepentingan ekspor produk Jepang serta impor sumber daya mentah dari negara yang dikerjasamanya. Di bidang militer,

Jepang bersama pasukan militernya, *Self Defense Forces* (SDF) atau Jietai, terlibat aktif dengan menjadi bagian dari UNPKO dan berperan penting di konflik Sudan Selatan pada tahun 2011-2017. Keterlibatan Jepang juga dapat dilihat dalam sektor lain, seperti kerangka kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, diplomasi, dan berbagai bantuan lainnya.

Semua upaya yang dilakukan Jepang untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui kontribusinya dalam OECD dan UNPKO ini tentunya didasari oleh kepentingan nasionalnya sendiri, yaitu untuk memperoleh jaminan keamanan, dapat berpartisipasi secara langsung dalam penciptaan perdamaian dan keamanan dunia, dapat menyelesaikan masalah budaya dan sosial Jepang, menjembatani Jepang dalam melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain, serta sebagai ajang promosi perkembangan perekonomiannya kepada dunia. Hal ini bertujuan agar Jepang mendapatkan pengakuan di lingkungan internasional dan pembuktian atas perubahan citra masa lalu Jepang yang saat ini berubah menjadi negara yang lebih cinta damai dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Jepang ingin memperkuat perannya di mata dunia internasional dengan memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Salah satunya ialah dengan menunjukkan kepada dunia bahwa saat ini Jepang memiliki ekonomi yang maju, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Jepang di antara negara lainnya.

Intensi Jepang untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB menghasilkan tanggapan pro dan kontra dari dunia internasional. Sebagian negara yang setuju dengan Jepang berpendapat bahwa misi yang dibawa Jepang sangat relevan dengan kondisi politik saat ini. Mereka setuju dengan keinginan Jepang untuk mereformasi hak veto karena penggunaan hak veto dinilai kurang demokratis. Sebagian negara menolak karena masih ada trauma atas perlakuan Jepang pada masa Perang Dunia II. Selain itu, salah satu negara pemegang hak veto, China, juga menolak hal tersebut karena merasa terancam atas terganggunya dominasi China di Asia.

Namun, penulis memiliki pemikiran bahwa apapun yang dilakukan oleh Jepang, terlihat mustahil untuk membawanya menduduki kursi tetap Dewan Keamanan. Hal ini dikarenakan dari lima anggota tetap, hanya Amerika Serikat saja yang secara penuh

mendukung Jepang, mengingat bahwa sebuah resolusi akan sulit dicapai apabila terdapat pertentangan dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Meski banyak negara yang mendukung Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan, tetap akan sulit tercapai karena sifat rasionalitas dari sebuah negara yang beranggapan bahwa perubahan itu hanya akan memperburuk disparitas antar anggota. Dengan begitu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang, di mata para anggota tetap Dewan Keamanan PBB semata-mata hanyalah bentuk dari kewajiban Jepang atas segala tugas yang telah ditanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, H., Shindo, M., & Kawato, S. (1994). *The Government and Politics of Japan*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Adem, S. (2001). Emerging Trends in Japan-Africa Relations: An African Perspective. *African Studies Quarterly*, 61-69. Retrieved from OECD.
- Alfarisi, H. (202, January 20). *Rezim Internasional, Konsep Dasar, Pengertian dan Studi Kasus*. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all&page_images=1
- Asih, & Cahyaningtyas, A. (2015). Protes Jepang terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara oleh Indonesia Tahun 2014. *Thesis of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 23-46.
- Blaker, M. (1977). *Japanese International Negotiating Style, "Who Wins: Bargaining Power and Success"*. New York: Columbia University Press.
- Butarbutar, B. S. (2008, November 25). *Reformasi PBB dan Ambisi Jepang Jadi "Negara Normal"*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/16159/reformasi-pbb-dan-ambisi-jepang-jadi-negara-normal>
- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi*. Malang: Intrans Publishing.
- Indrawan, J. (2019). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- Irawan, H., Rizki, K., & Zulkarnain. (2021). Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Keterlibatan Self Defense Force (SDF) Dalam United Nations Peacekeeping Operations (UN-PKO): Studi Kasus PKO di Sudan Selatan Tahun 2011-2017. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 31-47.
- Krashner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *Journal of International Organization*, 185-205.
- Kurniawati, E. (2014). Peluang Jepang Untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. *Pena Wimaya*, 39-46.
- Simanihুরু, Y. A. (2018). Peningkatan Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Mengamankan Kepentingannya Melalui Tokyo International Conference on African Development (TICAD) Terhadap Kenya Tahun 2014-2016. *Thesis of Universitas Airlangga*.
- Welle, D. (2004, 9 22). *G4 Nations Bid for Permanent Security Council Seat*. Retrieved from Global Policy Forum: <https://archive.globalpolicy.org/security/reform/cluster1/2004/0922permbids.htm>

- Widarahesty, Y. (2008). Alasan Jepang untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB: Studi tentang Diplomasi Internasional Jepang Pasca Perang Dunia ke-II. *Thesis of Universitas Indonesia*, 93-96.
- Wild, L. e. (2011). Informing the Future of Japan's ODA. In *Japan's ODA Within African Context* (pp. 8-39). London: The Overseas Development Institute.
- Yang, C. (2020, September 26). *Japan's Dreams for UN Security Council Seat Crushed by Its Historical Mirages*. Retrieved from Globaltimes.cn: <https://www.globaltimes.cn/content/1202114.shtml>